

## JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal ( <i>Bookbuilding</i> )	: 24 Mei – 8 Juni 2017
Tanggal Efektif	: 16 Juni 2017
Masa Penawaran Umum	: 19 Juni 2017
Tanggal Penutupan	: 20 Juni 2017
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 22 Juni 2017
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 23 Juni 2017

## NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017.

## JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

## JUMLAH POKOK OBLIGASI, SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PEMESANAN

Jumlah Pokok Obligasi adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000,000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan Satuan Pemesanan sebesar Rp5.000,000,- (lima juta Rupiah).

## BUNGA OBLIGASI, JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI. Tingkat bunga Obligasi adalah tetap sebesar 4% (+ persen) per tahun dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000,000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 September 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 22 Juni 2022. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

## HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Persoan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

## KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, dimana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 September 2017, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 22 Juni 2022. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal
1	22 September 2017
2	22 Desember 2017
3	22 Maret 2018
4	22 Juni 2018
5	22 September 2018
6	22 Desember 2018
7	22 Maret 2019
8	22 Juni 2019
9	22 September 2019
10	22 Desember 2019
11	22 Maret 2020
12	22 Juni 2020
13	22 September 2020
14	22 Desember 2020
15	22 Maret 2021
16	22 Juni 2021
17	22 September 2021
18	22 Desember 2021
19	22 Maret 2022
20	22 Juni 2022

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak tanggal distribusi Obligasi secara elektronik (yang juga merupakan Tanggal Emisi), dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

## JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Persoan dapat melakukan pembelian kembali obligasi yang ditunjukkan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penutupan. Pembelian kembali (*buy back*) obligasi Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan. Pembelian kembali (*buy back*) obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, rencana pembelian kembali wajib dilaporkan Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali obligasi. Perseroan wajib mengemukakan rencana pembelian obligasi paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal pembelian kembali obligasi. Pelaksanaan pembelian kembali obligasi dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek. Pembelian kembali obligasi selengkapnya dapat dilihat dalam prospektus Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

## HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, antara lain meliputi:

1. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ketentuan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atau kelainan membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayarkan Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dibayar (termasuk denda) jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPD dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotokopi Konfirmasi Tertulis untuk RUPD dari KSEI yang diperoleh dari Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPD kepada Wali Amanat.

## HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

## PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sesuai dengan pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan kewajiban terhadap Perseroan. Perseroan, selama berkegiatan jangka waktu Obligasi dari sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

## RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam di dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, tanpa mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditentang dimana Obligasi dicatatkan. Penjelasan lebih lanjut dari RUPO dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

## KELAJIAN PERSEROAN (WANPRESTASI)

Sesuai dengan pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan apabila terjadi kelainan (wanprestasi) oleh Perseroan, maka setelah Wali Amanat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perbaikan setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis tersebut, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kelainan atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar Harian dan selanjutnya Wali Amanat wajib memanggil para Pemegang Obligasi untuk mengadakan RUPO menurut cara-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan lebih lanjut dari kelainan (wanprestasi) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

## PERPAJAKAN

Keterangan lengkap mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

## TATA CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran. Apabila tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Apabila pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi tidak diambil oleh Pemegang Obligasi pada saat jatuh tempo maka jumlah pembayaran yang tidak diambil tersebut wajib disimpan oleh Agen Pembayaran untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang bersangkutan dan Perseroan dibebaskan oleh KSEI sebagai Agen Pembayaran dari tanggung jawab pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi.

## WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. PT Bank Mega Tbk. telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk  
Menara Bank Mega, Lantai 16  
Jl. Kapten Tendean Kav. 12 – 14A  
Jakarta 12790  
Telp: (021) 79175000 Fax : (021) 7990720

## HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan Peraturan No. IX.C.1, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-332/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 11 April 2017 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya telah mendapat peringkat:

(*Single A Minus*)

Hasil pemeringkatan ini berlaku untuk periode 10 April 2017 sampai dengan 1 April 2018. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo.

## TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Tata cara pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus.

## PENUHUNAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Persoan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

## PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PESANAN MENEMERMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PELANGGARAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



beyond construction

## PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha

Konstruksi – *Engineering Procurement Construction (EPC)* – Properti – *Real Estate* – Investasi - *Infrastruktur*

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Raya Pasar Minggu, KM 18, Jakarta 12510 – Indonesia  
Telp.: (021) 797-5312 Faksimili: (021) 797-5311  
Website: [www.adhi.co.id](http://www.adhi.co.id)  
Alamat e-mail: [adhi@adhi.co.id](mailto:adhi@adhi.co.id)

Memiliki 6 (enam) Divisi Konstruksi dan 4 (empat) Entitas Anak

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000,000,- (LIMA TRIILIUN RUPIAH)

(“PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN

MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP I TAHUN 2017

DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.500.000.000,000,- (TIGA TRIILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

(“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tingkat bunga Obligasi adalah tetap sebesar 4% (+ persen) per tahun dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.500.000.000,000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 September 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 22 Juni 2022. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK YANG BERGERAK MAUPUN YANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIANN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* (TANPA HAK PREFEREN) DENGAN HAK-HAK KREDITOR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIANN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG DIJUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIANN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI WAJIB DILAPORKAN PERSEROAN KEPADA OJK PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN RENCANA PEMBELIAN OBLIGASI PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELENGKAPNYA DAPAT DI LIHAT DALAM PROSPEKTUS BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KENAIKAN HARGA BAHAN BAKUMATERIAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DI LIHAT DALAM PROSPEKTUS BAB VI MENGENAI FAKTOR RISIKO.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dari

PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):

ida-

(*Single A Minus*)

Untuk keterangan lebih lanjut tentang pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I Prospektus

Pencatatan Obligasi akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

Penerbitan Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

BAHANA

BCAsekuritas

Danareksa

mandiri

PT Bahana Sekuritas  
(Terafiliasi)

PT BCA Sekuritas

PT Danareksa Sekuritas  
(Terafiliasi)

PT Mandiri Sekuritas  
(Terafiliasi)

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Akan Ditentukan Kemudian

WALI AMANAT

PT BANK MEGA Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 24 Mei 2017

	31 Desember 2016	2015*
<b>Keterangan</b>		
Beban Pajak	297.515	281.066
Laba Periode Berjalan	315.108	465.026
Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	404.657	878.754
<i>*Reklasifikasi akun</i>		
<b>RASIO-RASIO KONSOLIDASIAN PENTING</b>		
<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2016</b>	<b>2015</b>
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>		
Pendapatan usaha	17,8	8,5
Laba kotor	17,7	(0,3)
Laba usaha	19,2	(6,4)
Laba bersih	(32,2)	40,2
<b>Rasio Usaha (%)</b>		
Laba usaha terhadap pendapatan usaha	6,6	6,5
Laba usaha terhadap jumlah aset	3,6	3,6
Laba usaha terhadap ekuitas	13,4	11,8
Laba periode berjalan terhadap pendapatan usaha	2,8	5,0
Laba tahun berjalan terhadap jumlah aset	1,6	2,8
Laba tahun berjalan terhadap ekuitas	5,8	9,0
<b>Rasio Keuangan (%)</b>		
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek (x **)	1,3	1,6
Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas	29,5	42,3
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (**)	0,8	0,6
Jumlah Liabilitas terhadap jumlah ekuitas	269,2	224,7
Jumlah Liabilitas terhadap jumlah aset	72,9	69,2
EBITDA/beban bunga pinjaman (x **)	3,6	4,8
<b>Keterangan:</b>		
**) Merupakan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut:		
- <i>Debt equity ratio</i> : pinjaman yang berbunga dibagi dengan total ekuitas maksimum 2,75		
- <i>Time interest earned</i> : EBITDA dibagi dengan bunga pinjaman pada tahun ke I dan tahun ke II minimum 2,5 dan untuk tahun ke III sampai tahun ke VII minimum 3. EBITDA adalah laba sebelum pajak konsolidasi ditambah biaya bunga ditambah depresiasi termasuk depresiasi dalam beban kontrak dan Amortisasi. Beban Bunga adalah bunga pinjaman yang wajib dibayar oleh Perseroan termasuk kewajiban pembayaran pendapatan bagi hasil.		
- Likuiditas : aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar minimum 1		

Ringkas data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

## ANALISIS PEMBAHASAN MANAJEMEN

## I. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

## Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp11.063.943 juta, meningkat sebesar Rp1.674.373 juta atau sebesar 17,8% dengan jumlah proyek sebanyak 72 proyek. Kenaikan terbesar terdapat pada proyek BUNN sebesar Rp3.234.026 juta menjadi Rp5.873.388 juta dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.629.362 juta. Peningkatan pendapatan usaha ini terutama didukung oleh pendapatan dari jasa konstruksi yang meningkat sebesar Rp1.207.729 juta atau 15,1%. EPC meningkat Rp362.585 juta atau 57,1% dan investasi industri meningkat Rp43.356 juta atau 29,1% dibandingkan dengan tahun 2015.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp9.948.797 juta, meningkat sebesar Rp1.533.871 juta atau 18,2% dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.414.926 juta. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha dan utamanya merupakan kontribusi dari biaya *overhead* yang meningkat sebesar 30,3% menjadi Rp1.952.695 juta di 2016 dari Rp1.491.729 juta di 2015, sub kontraktor meningkat 31,8% menjadi Rp3.007.652 juta di 2016 dari Rp2.281.595 juta di 2015 dan bahan baku meningkat 13,0% menjadi Rp3.693.938 juta di 2016 dari Rp3.268.908 juta di 2015.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp1.115.146 juta, meningkat sebesar Rp140.502 juta atau 14,4%. Peningkatan ini terutama didukung oleh perolehan kontrak BUNN yang meningkat sebesar Rp3.234.026 juta atau 122,5% menjadi Rp5.873.388 juta di tahun 2016.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp728.591 juta, meningkat sebesar Rp117.361 juta atau 19,2% dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp611.230 juta.

Beban Bunga

Beban Keuangan Perseroan per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp257.959 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp121.241 juta atau 88,7% dari Rp136.718 juta di tahun 2015. Beban keuangan ini terdiri dari Bunga Utang Bank sebesar Rp180.072 juta, Bunga Obligasi sebesar Rp112.188 juta, Bagi Hasil Sukuk sebesar Rp21.813 juta dan Kapitalisasi Bunga Pinjaman sebesar Rp56.113 juta.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp612.623 juta menurun sebesar Rp133.468 juta atau 17,9% dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun 2015 sebesar Rp746.091 juta.

## Laba Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2016 adalah sebesar Rp313.451 juta, menurun sebesar Rp150.234 juta atau 32,4% dari tahun 2015 sebesar Rp463.685 juta. Penurunan laba bersih ini terjadi karena terjadi karena peningkatan beban pokok pendapatan dan peningkatan beban keuangan sebesar masing-masing 18,2% dan 88,7% di 2016.

## Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Laba komprehensif Perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp404.657 juta menurun sebesar Rp474.097 juta atau 53,95% dibandingkan dengan Laba komprehensif Perseroan pada tahun 2015 sebesar Rp878.754 juta.

Faktor-faktor berikut ini dapat mempengaruhi efektivitas terhadap total penjualan, yang antara lain meliputi:

- a) Perubahan harga jual terhadap penjualan  
Jika terjadi kenaikan harga secara keseluruhan, maka hal ini akan mempengaruhi pendapatan usaha perseroan. Dengan demikian, perseroan melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi dari kerugian akibat kenaikan harga tersebut dengan cara meninjau setiap kontrak-kontrak proyek dengan melakukan Addendum.
- b) Produk baru  
Dengan terciptanya produk-produk baru di pasar industri konstruksi yang sedikit-banyaknya akan mempengaruhi kegiatan operasional dan pendapatan usaha perseroan, dengan ini perseroan selalu melakukan inovasi-inovasi dan diversifikasi produk guna mempertahankan pasar yang sudah dikuasai perseroan.
- c) Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan promosi terhadap penjualan produk  
Untuk menunjang kegiatan promosi produk-produk Perseroan setiap tahunnya, Perseroan mengeluarkan biaya untuk kegiatan promosi sekitar



## ► DUGAAN KARTEL BAWANG PUTIH

# KPPU Incar Pelaku Usaha Besar yang Mengatur Pasar

JAKARTA — Pelaku usaha besar dengan penguasaan pasar mencapai 50% diduga mengatur distribusi bawang putih Tanah Air. KPPU pun kini meningkatkan status dugaan kartel ke level penyelidikan.

Peningkatan status itu dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha setelah Rapat Komisi pada Selasa (23/5). Investigator KPPU menunjukkan fakta adanya dugaan pengaturan distribusi bawang putih oleh beberapa pelaku usaha yang menguasai pasar hingga sekitar 50%.

Indikasi dugaan pengaturan itu, kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf, mulai dari proses impor hingga distribusi. KPPU menduga terjadi pengaturan pasokan ke pasar mulai dari impor melalui dua pintu masuk utama impor bawang putih ke Indonesia.

"Masuknya dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pelabuhan Belawan

Medan. Dugaan pengaturan ini telah berujung pada naiknya harga jual bawang putih di pasaran," katanya, kemarin.

Komposisi volume impor bawang putih di dua pintu masuk utama tersebut 94% melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sisanya via Pelabuhan Belawan Medan. Dugaan mengarah kepada lima grup pelaku usaha yang menguasai impor bawang putih di Pelabuhan Tanjung Perak dan satu kelompok pelaku usaha menguasai di Pelabuhan Belawan.

Saat ini, Indonesia mengimpor sekitar 97% kebutuhan bawang putih domestik dan hanya 3% yang dihasilkan sendiri di dalam negeri. Impor bawang putih Indonesia hampir semuanya berasal dari China.

Direktur Penindakan KPPU Gopra Panggabean mengatakan impor bawang putih pada awal tahun menunjukkan

angka yang cukup tinggi, tetapi memasuki Maret permintaan impor menurun.

"Harusnya permintaan menjelang Ramadan meningkat, tetapi mengapa importnya diturunkan, ini yang menjadi pertimbangan. Penyelidikan kami kumpulkan data dari Kemendag, Bea Cukai dan juga Kementerian," katanya.

Dalam penelitian, KPPU membandingkan kondisi tingginya harga pada April 2017 dengan Oktober 2016. Pada tahun lalu, pasokan lebih sedikit dibandingkan dengan April, tetapi lonjakan harga lebih eksesif pada tahun ini.

Salah satu indikasi peningkatan status penyelidikan juga dari serentaknya penurunan impor bawang putih pada Maret oleh pelaku yang diduga kartel. Tak menutup kemungkinan, pelaku usaha yang diduga kartel ada hubungannya dengan temuan 182 ton bawang putih

Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan KPPU. Dengan adanya peningkatan status dugaan kartel bawang putih, pihaknya memastikan tetap berkoordinasi.

"Mengetahui hukuman bagi pelaku yang melakukan kartel, bisa menggunakan UU No. 5/1999 atau pidana. Bisa digabungkan," katanya saat dihubungi *Bisnis*.

Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia (APBPI) mengakui kemungkinan adanya penguasaan pasar bawang putih hingga 50% yang berasal dari afiliasi kelompok usaha.

Ketua APBPI Piekto Nyoto Setia mengatakan besarnya kekuatan grup usaha yang menguasai impor bawang putih karena kekuatan jaringan, sehingga mendapatkan barang lebih murah. Piekto menambah-

kan grup besar yang menguasai impor bawang putih tidak menjadi anggota asosiasi di APBPI.

"Kalau anggota kami dari 40, ada 15 yang aktif melakukan importasi. Total pangsa pasar bawang putih dari anggota asosiasi hanya 15%. Kami kalah karena mereka lebih murah, dan jaringan yang besar," tuturnya kepada *Bisnis*.

Menurutnya, tidak sulit melihat pangsa pasar importir bawang putih, jika dapat melihat dokumen pemberitahuan impor barang (PIB). Mudah-mudahan melakukan importasi bawang putih dianggap sebagai salah satu alasan pengusaha lebih memilih jadi importir.

Selain itu, kuatnya penetrasi pasar yang dilakukan pelaku, menentukan besaran pangsa pasarnya. "Mereka menguasai Jabodetabek, sementara kami susah masuk." (*David Eka Issetiabudi*)

yang telah mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-49910. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 24 Maret 2009, Tambahan No.8682.

Anggaran Dasar kemudian diubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.58 tanggal 28 April 2014, dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-02123.40.20.2014 tanggal 29 April 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-02123.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, mengenai perubahan Pasal 3 dengan adanya penambahan bidang usaha. Guna menyesuaikan dengan peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 tanggal 11 Mei 2015, dibuat dihadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0521714 tanggal 13 Mei 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0521714 tanggal 13 Mei 2015 tanggal 13 Mei 2015, dan diumumkan dalam Berita Negara RI No.95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No.5131L.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah lagi dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar No.35 tanggal 22 Desember 2015 ("Akta No.35 Tanggal 22 Desember 2015"), dibuat dihadapan Fatihah Helmi, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0990446 tanggal 22 Desember 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3596988.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 22 Desember 2015, mengenai peningkatan modal disetor Perseroan.

Terakhir Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga No.05 tanggal 5 Agustus 2016 ("Akta No.05 Tanggal 5 Agustus 2016"), dibuat dihadapan Ashyora Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0077404 tanggal 4 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0103307.AH.01.11, Tahun 2016 tanggal 4 September 2016, mengenai perubahan klasifikasi saham Perseroan yang semula tanpa seri, menjadi Saham Seri A Diwama dan Saham Seri B.

### STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEORAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga No.05 tanggal 5 Agustus 2016, dibuat oleh dan dihadapan Ashyora Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0077404 tanggal 4 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0103307.AH.01.11, Tahun 2016 tanggal 4 September 2016, yang dikeluarkan oleh Daftar Perseroan tanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh PT Datinido Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

Permodalan	Saham		Nilai Nominal (Rp)
	Seri A Diwarna @ Rp.100,00	Seri B @ Rp.100,00	
Modal Dasar	1	-	100,00
	-	5.439.999.999	543.999.999.900,00
		<b>Total</b>	<b>544.000.000.000,00</b>
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	1	-	100,00
	-	1.816.046.623	181.604.662.300,00
Masyarakat (dibawah 5%)	-	1.744.802.752	174.480.275.200,00
		<b>Total</b>	<b>356.084.937.600,00</b>
Sisa Saham Dalam Portepel	-	1.879.150.624	187.915.062.400,00
		<b>Total</b>	<b>187.915.062.400,00</b>

#### Keterangan:

Perubahan struktur permodalan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan bahwa berdasarkan RUPS Luar Biasa Ketiga Perseroan yang diadakan pada tanggal 5 Agustus 2016 telah mengambil keputusan antara lain menyetujui melakukan perubahan klasifikasi saham pada Perseroan yang semula tanpa seri, menjadi Saham Seri A Diwama dan Saham Seri B. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No.05 Tanggal 5 Agustus 2016, Saham Seri A Diwama khusus dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Saham Seri B dapat dimiliki masyarakat.

### PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEORAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No.35 tanggal 21 Maret 2017, dibuat dihadapan Ashyora Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-002668 tanggal 29 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0041539.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mochamad Fadlroel Rachman
Komisaris	: Bobby Achriul Awal Nazief
Komisaris	: Wicpto Setiadi
Komisaris	: Rido Ananda Anwar
Komisaris Independen	: Muchlis Rantoni Luddin
Komisaris Independen	: Hironimus Hilapok

#### Direksi

Direktur Utama	: Budi Harto
Direktur Keuangan & Legal	: Haris Gunawan
Direktur SDM, Sistem & Investasi	: BEP Adji Salmoko
Direktur Operasi I	: Partha Sarathi
Direktur Operasi II	: Budi Soddewa Soediro
Direktur Operasi III	: Pundjung Setya Brata

#### KEGIATAN USAHA

Sebagaimana tertera pada Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir pada Akta No. 05 tanggal 5 Agustus 2016, ruang lingkup bidang usaha yang sedang dijalani oleh Perseroan meliputi:

#### 1. Konstruksi

- Aktivitas usaha Perseroan mencakup:
  - Jasa konstruksi sipil mengerjakan bangunan sipil (infrastruktur).
  - Jasa konstruksi gedung mengerjakan bangunan gedung termasuk gedung bertingkat tinggi beserta sarana dan prasarana penunjangnya.
  - Kontraktor transportasi perkotaan.

#### 2. Energi (Engineering, Procurement and Construction/EPC)

Kegiatan usaha yang meliputi perkerjasama, pengadaan dan konstruksi yang lebih fokus pada bidang oil and gas dan power.

#### 3. Properti

Kegiatan usaha yang fokus dalam mengembangkan kawasan mixed-use dan gedung bertingkat (*highrise building*) untuk komersial, perkantoran maupun hunian (*apartment*), kawasan hunian (*landed-house*) yang berkualitas, rumah kantor (*rukan*), rumah toko (*ruko*) dan pusat perbelanjaan (*mal*) baik itu di lahan milik sendiri maupun lahan kerjasama. Termasuk mengembangkan dan mengoperasikan hotel di beberapa kota besar di lahan milik Perseroan untuk mengoptimalkan aset perusahaan dan di beberapa properti milik anak perusahaan.

#### 4. Industri

Aktivitas usaha Perseroan yang mencakup produksi manufaktur tetapi presentasi untuk kebutuhan bangunan:

- Jalan dan Jembatan
- Gedung
- Pondasi dan Penahan Tanah
- Dermaga dan Lepas Pantai
- Kebutuhan Khusus

#### 5. Investasi

Aktivitas usaha Perseroan yang mencakup Investasi pada bidang yang terkait dengan lini usaha. Kelima lini bisnis tersebut merupakan hasil dari transformasi bisnis Perseroan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan konsisten dalam melakukan peninjauan dan peningkatan kelima bidang usahanya, antara lain dalam bidang:

- Kompetensi SDM.
- Tata kelola perusahaan yang profesional.
- Budaya perusahaan yang selaras dan membumi.
- Penggunaan manajemen keuangan, terutama pada perhitungan dan penggunaan manajemen pendanaan.
- Operasional perusahaan yang efektif dan efisien dengan pola *incorporated*.

#### KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Berikut ini keterangan mengenai Entitas Anak Perseroan yang memiliki kontribusi lebih dari 10% dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi:

### 1. PT Adhi Persada Properti ("APP")

#### Riwayat Singkat

APP semula bernama PT Adhi Realty, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhi Realty No. 1 tanggal 22 Mei 2002, dibuat di hadapan Chairunnisa Said Selenggara, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-15255.HT.01.01.TH.2002 tanggal 14 Agustus 2002, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 2002 dengan No.2104/BH.09.03/X/2002 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.93 tanggal 19 November 2002, Tambahan No.14074.

Anggaran Dasar APP yang tercantum dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dimana terakhir Anggaran Dasar APP diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 18 Juni 2015 ("Akta No.43 Tanggal 18 Juni 2015"), dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-0937736.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0944155 tanggal 22 Juni 2015 (untuk perubahan Pasal 4 ayat 2) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3522536.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No.43 Tanggal 18 Juni 2015, kegiatan usaha APP adalah bergerak dalam bidang properti dan Real Estate dan melakukan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa.

#### Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No.43 Tanggal 18 Juni 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham APP adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	247.343	247.343.000.000,00
Modal Disetor	247.343	247.343.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	2.657	2.657.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	246.628	246.628.000.000,00	99,71
Koperasi Karyawan PT Adhi Realty	715	715.000.000,00	0,29
Total	247.343	247.343.000.000,00	100,00

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 19 tanggal 15 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Ety Nugrahawati, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0078677 tanggal 8 September 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105235.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 September 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris APP adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Budi Soddewa Soediro
Komisaris	: BEP Adji Salmoko
Komisaris	: Pundjung Setya Brata
Komisaris	: Nurul Kamali
Komisaris	: KI Syahgolang Permata

#### Direksi

Direktur Utama	: Agus Sitaba
Direktur Keuangan	: Ary Sulistyio Vambudi
Direktur	: Pulung Prahosto
Direktur	: Wahyuni Santutri

#### Iktisair Keuangan

Berikut ini adalah iktisair data keuangan penting dari PT APP untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Jumlah Aset	3.768.885	3.184.965
Jumlah Liabilitas	2.804.281	2.391.621
Jumlah Ekuitas	964.604	793.344
Pendapatan	671.343	610.640
Laba Kotor	203.534	182.581
Laba Operasional	216.789	148.101
Laba Tahun Berjalan	133.480	101.888
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	133.480	92.380

Laba Operasional PT APP per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp216,8 miliar, meningkat 46,4% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp148,1 miliar. Peningkatan laba operasional ini dipengaruhi oleh menurunnya beban pemasaan sebesar 28,4%, dan menurunnya beban administrasi dan umum sebesar 0,4%, serta terdapat perolehan pendapatan lain-lain sebesar Rp67,3 miliar dibandingkan dengan tahun 2015 berupa pengenaan beban lain-lain sebesar Rp6,0 miliar. Untuk Laba Tahun Berjalan PT APP, terjadi peningkatan sebesar 31,0%, dari Rp101,9 miliar di tahun 2015 menjadi Rp133,5 miliar di tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan beban pajak penghasilan final sebesar 7,5%. Sementara untuk Laba Komprehensif Tahun Berjalan, terjadi peningkatan sebesar 44,5%, dari Rp92,4 miliar di tahun 2015 menjadi Rp133,5 miliar di tahun 2016. Peningkatan ini terjadi karena pada tahun 2016, Laba Tahun Berjalan PT APP tidak dikenakan efek penyusutan proforma seperti halnya Laba Tahun Berjalan pada tahun 2015.

APP memiliki kontribusi pendapatan sebesar 6,1% (enam koma satu persen) terhadap pendapatan Perseroan.

### 2. PT Adhi Persada Beton ("APB")

#### Riwayat Singkat

APB, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhi Persada Beton No.13 tanggal 10 Desember 2013 ("Akta Pendirian"), dibuat di hadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-02108.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0003813.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014.

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Anggaran Dasar APB belum mengalami perubahan.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha APB adalah menjalankan usaha industri beton pra-cetak beserta segala turunan produk-produk beton lainnya, jasa pemangasan terkait dengan produk beton pra-cetak beserta segala produk-produk beton lainnya.

#### Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham APB adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	60.000	60.000.000.000,00
Modal Disetor	60.000	60.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	180.000	180.000.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per Saham		
	Saham	Rupiah	%
Perseroan	59.400	59.400.000.000,00	99,00
Koperasi Jasa Adhi Sejahtera	600	600.000.000,00	1,00
Total	60.000	60.000.000.000,00	100,00

#### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.29 tanggal 25 Januari 2017, dibuat dihadapan John Eddy Rahman,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.03-0032667 tanggal 25 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0010432.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris APB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Pundjung Setya Brata
Komisaris	: Haris Gunawan
Komisaris	: Djoko Prabowo
Komisaris	: Wyono
Komisaris	: R. Koorriawan Rohadi Purwo

#### Direksi

Direktur Utama	: Rijanto Onggo Wahono
Direktur	: M. Ziad Choirin
Direktur	: Siswanto ST

#### Iktisair Keuangan

Berikut ini adalah iktisair data keuangan penting dari APB untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Jumlah Aset	473.968	384.033
Jumlah Liabilitas	401.606	318.692
Jumlah Ekuitas	72.362	65.311
Pendapatan	192.366	149.010
Laba Kotor	22.473	32.173
Laba Operasional	12.439	9.109
Laba Tahun Berjalan	7.051	1.242
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	7.051	1.242

Pada tahun 2016, Laba Kotor PT APB mengalami penurunan sebesar 30,1%, dari Rp32,2 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp22,5 miliar pada tahun 2016. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya beban pokok pendapatan perusahaan, yaitu sebesar 45,4%, yang seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha di tahun 2016. Sementara pos Laba Operasional mengalami peningkatan sebesar 36,6%, dari Rp9,1 miliar di tahun 2015 menjadi Rp12,4 miliar di tahun 2016. Peningkatan ini dipengaruhi oleh menurunnya Beban Umum dan Administrasi sebesar 59,1%, menurunnya Beban Penjualan sebesar 90,3%, serta meningkatnya penghasilan lain-lain sebesar 161,5%. Untuk pos Laba dan Laba Komprehensif Tahun Berjalan, keduanya mengalami peningkatan sebesar 467,7% dari Rp1,2 miliar di tahun 2015 menjadi Rp7,1 miliar di tahun 2016. Peningkatan ini dipengaruhi oleh menurunnya Beban Umum dan Administrasi sebesar 59,1% dan menurunnya Beban Keuangan sebesar 54,5%.

### 3. PT Adhi Persada Gedung ("APG")

#### Riwayat Singkat

APG, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhi Persada Gedung No.14 tanggal 10 Desember 2013 ("Akta Pendirian"), dibuat di hadapan Ir.Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-02265.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0004081.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47 tanggal 13 Juni 2014, Tambahan No.10496.

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Anggaran Dasar APG belum mengalami perubahan.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha APG adalah menjalankan usaha dibidang konstruksi seluruh sektor pembangunan gedung, penyelesaian konstruksi gedung dalam rangka penyelesaian bangunan gedung, pekerjaan *design & build*, pekerjaan mekanikal dan elektrik.

#### Kepemilikan Saham